

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **2.1 LITERATUR PENELITIAN**

##### **2.1.1 Konsep Kemiskinan**

Menurut Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel *“Poverty and Human Development”* mengatakan bahwa: *“The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves”* (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Dalam perkembangannya teori kemiskinan (dalam hikmat, 2004:6), kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan

- a) Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umu, serta keadaan tanah yang tandus;
- b) Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Penyebab terjadinya kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti yang produktivitasnya rendah, rendahnya pendapatan dan rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan (Rahman : 76). Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal, faktor eksternal yaitu kelompok referensi yang merupakan kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang, keluarga memegang peranan besar dalam pembentukan sikap dan perilaku individu, kelas sosial sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, dan kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Dampak adanya kemiskinan yaitu pengangguran karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak adanya keterampilan untuk berkembang, adanya kriminalitas, putus sekolah, kekurangan asupan gizi karena tidak adanya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

## 2.1.2 Dimensi kemiskinan dan ciri-ciri Kemiskinan.

Dimensi kemiskinan terdiri dari beberapa aspek (Suharto, 2005:80):

1) Aspek ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat di definisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

2) Aspek Politik

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*), kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

3) Aspek sosial-psikologis

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas

Dari pemahaman dimensi kemiskinan diatas maka dapat di jabarkan suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri kemiskinan itu sendiri, menurut Suharto (2005:133) ciri-ciri kemiskinan itu terdiri dari :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti
  - a) Kesehatan
  - b) Pendidikan
  - c) Sanitasi
  - d) Air bersih
  - e) Transportasi
- c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga)
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam
- f. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
- g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti
  - Anak terlantar
  - Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT)

- Janda miskin
- Kelompok marginal dan terpencil.

### **2.1.3 Karakteristik Kemiskinan**

Menurut BPS (2008), karakteristik rumah tangga miskin di Indonesia dikelompokkan dalam bidang sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan, uraian ringkas masing-masing karakteristik tersebut sebagai berikut :

#### **a. Karakteristik Sosial Demografi**

Karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin, meliputi :

1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,70 (perkotaan) dan 4,64 orang (perdesaan),
2. Presentase perempuan sebagai kepala rumah tangga mencapai 14,18% (perkotaan) dan 12,30% (perdesaan)
3. Rata-rata usia kepala rumah tangga 48,57 tahun (perkotaan) dan 47,86 tahun (perdesaan),
4. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah yang dijalani kepala rumah tangga yaitu 5,19 tahun (perkotaan) dan 4,06 tahun (perdesaan).

#### **b. Karakteristik Pendidikan**

Karakteristik pendidikan meliputi:

1. Presentase kepala rumah tangga yang buta huruf sebesar 14,30% (perkotaan), dan 19,57% (perdesaan)
2. Tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yang tidak tamat SD dan tamat SD, diperkotaan sebesar 37,13% dan 35,55% sedangkan di perdesaan sebesar 45,36% dan 41,15%.

#### **c. Karakteristik Ketenagakerjaan**

Karakteristik ketenagakerjaan meliputi :

1. Rata-rata presentase pengeluaran rumah tangga per kapita/bulan atau sumber penghasilan utama rumah tangga di perkotaan sebesar 14,71% yang tidak bekerja dan 30,02% yang bekerja di sektor pertanian sedangkan di perdesaan sebesar 8,67% yang tidak bekerja dan 68,99% yang bekerja di sektor pertanian.
2. Status pekerjaan kepala rumah tangga, antara lain: tidak bekerja dan berusaha sendiri, masing-masing sebesar 14,71% dan 40,86% untuk perkotaan sedangkan perdesaan sebesar 8,67% dan 60,63%

#### **d. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)**

Karakteristik tempat tinggal meliputi :

1. Luas lantai < 8 m<sup>2</sup> sebanyak 31,01% (perkotaan) dan 29,61% (pedesaan)
2. Lantai tanah sebesar 18,68% (perkotaan) dan 31,21% (pedesaan)
3. Jenis atap rumah yang terbuat dari ijuk/rumbia sebesar 0,41% (perkotaan) dan 4,57% (pedesaan),
4. Jenis dinding yang terbuat dari kayu dan bambu, masing-masing sebesar 30,57% dan 29,33%
5. Jenis penerangan, yaitu petromax/aladin dan pelita/sentir/obor, masing-masing sebesar 0,56% dan 3,07% untuk perkotaan sedangkan pedesaan sebesar 1,37% dan 19,71%
6. Sumber air bersih yang meliputi mata air, sumur tak terlindung, air sungai, air hujan sebesar 49,70% (perkotaan), dan 63,99% (pedesaan)
7. Jenis jamban sebesar 34,95% (perkotaan), dan 51,66% (pedesaan)
8. Status kepemilikan rumah tinggal yang bukan milik sendiri sebesar 14,93% (perkotaan) dan 7,27% (pedesaan).

#### **2.1.4 Konsep Penanganan Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu berbagai upaya penanganan atau penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan program. Upaya penanggulangan kemiskinan telah lama diupayakan oleh pemerintah baik melalui departemen maupun dinas yang ada di daerah, banyak departemen telah terlibat dalam upaya penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan selain merupakan pekerjaan sosial, harus diperhatikan pula akan upaya kemandirian pada masyarakat miskin itu sendiri, sehingga mereka tidak akan terlalu bergantung pada kondisi atau pihak lain.

Beberapa contoh upaya penanggulangan kemiskinan dan kemandirian yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya oleh pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam penanganan kemiskinan, skema penanggulangan kemiskinan tingkat nasional ditetapkan adanya 4 kluster

Dalam penanggulangan kemiskinan terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijadikan acuan dasar penyelesaian, antara lain:

- ✚ Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis dengan peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor yang efektif berpihak kepada kaum miskin

- ✚ Pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subyek yang diberdayakan
- ✚ Komitmen pemecahan masalah kemiskinan harus secara berkesinambungan dan terintegrasi
- ✚ Penerapan ekonomi mengacu pada Pasal 33 UU Dasar 1945
- ✚ Menerapkan pendekatan struktural
- ✚ Menerapkan pendekatan kultural
- ✚ Pemecahan secara terpadu, multidimensional dan saling terkait

Upaya penanggulangan kemiskinan telah lama diupayakan oleh pemerintah baik melalui departemen maupun dinas yang ada di daerah, banyak departemen yang telah terlibat dalam upaya penanganan kemiskinan ini. Penanganan kemiskinan selain merupakan pekerjaan sosial, harus diperhatikan pula akan upaya kemandirian pada masyarakat miskin itu sendiri, sehingga mereka tidak akan terlalu bergantung pada kondisi atau pihak lain, dengan kata lain penanganan kemiskinan harus menciptakan kemandirian kepada masyarakat miskin yang ditangani. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Strategi e-warong bantuan pangan non tunai dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu, mendukung keuangan inklusif, mempermudah pelaksanaan komplementaris program (melalui penggunaan satu kartu), penanggulangan kemiskinan dengan bantuan pangan non tunai mempunyai prinsip mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM, memberikan banyak pilihan dan kendali (waktu, jumlah, jenis, dan kualitas) kepada KPM sesuai preferensi, mendorong usaha eceran rakyat, dan memberikan akses jasa keuangan dan UMKM bagi KPM. Semua jenis bantuan baik dalam bentuk barang ataupun dana disalurkan secara non tunai melalui rekening tabungan, khusus bantuan non tunai dalam bentuk barang hanya bisa digunakan untuk penukaran bantuan pangan, pembayaran subsidi listrik, dan bantuan non tunai lainnya serta tidak dapat ditunaikan.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah terletak pada pengidentifikasian secara akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002). Sedangkan kritik yang dilontarkan terhadap program pengentasan kemiskinan antara lain mengenai penetapan sasaran, yakni dalam penentuan penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan. Upaya

penanggulangan kemiskinan yang lalu perlu dikoreksi secara mendasar diantaranya: (1) kebijakan yang terpusat dan seragam; (2) memposisikan masyarakat sebagai obyek dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; (3) asumsi permasalahan dan penanggulangan kemiskinan yang sering dipandang sama (4) kurang memperhatikan keragaman budaya; (5) kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya seringkali tumpang tindih; (6) kebijakan yang bersifat sektoral dan daerah kurang diberdayakan dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan (Jurnal WIGA :80).

## **2.2 METODE PENELITIAN**

### **2.2.1. Tabel Kebutuhan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan seperti Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berkaitan. Sedangkan data primer diperoleh langsung melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) serta *stakeholder* di wilayah penelitian yang telah ditetapkan.

### **2.2.2. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Primer**

##### **a. Metode Wawancara**

Wawancara digunakan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara dengan pihak yang terkait dengan program e-warong, masyarakat penerima manfaat, dan masyarakat pelaku e-warong.

##### **b. Metode Kuesioner**

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner harus memiliki poin yang menjadi perhatian yaitu masalah yang ingin dicari solusinya. (Nazir,2003). Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dengan metode kuesioner ini penulis dapat memperoleh data dari Dinas Sosial, Ketua PKH, warga penerima manfaat dan penjual.

##### **c. Metode Observasi langsung**

Observasi langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kondisi langsung kios-kios e-warong. Observasi langsung dalam penelitian dilakukan dengan mengambil gambar/foto objek yang diteliti yaitu kios e-warong dan

komiditi kebutuhan yang berada di kios tersebut. Dengan melakukan pengamatan langsung, data yang diperoleh dapat segera didapatkan dan dicatat dan tidak menggantungkan data dari catatan atau ingatan orang lain (Nazir,2003).

## 2. Sekunder

### a. Metode Telaah Pustaka

Untuk memperluas wawasan dan memperkuat teori yang dipakai dalam penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka dengan mempelajari tulisan dan penelitian dari penulis lain serta bahan-bahan lain seperti jurnal.

### b. Metode Telaah Dokumen

Untuk membantu penelitian ini penulis melakukan telaah dokumen-dokumen yang telah di dapatkan dengan mempelajari foto ataupun dokumen lainnya

### **2.2.3. Teknik atau alat Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya disertai dengan interpretasi.

Menurut Sukmadinata (2009 : 53-60), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Sukmadinata (2009:18) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa tertulis dan mempertimbangkan pendapat orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling, teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan menggunakan sampel random sampling, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009:118), lokasi penelitian yang dilakukan adalah Kota Semarang dengan pengambilan sampel Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang. Pengambilan sampel di Kelurahan Tandang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kelurahan tersebut data warga miskin tertinggi di Kota Semarang.

